



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Juni 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : LEGISLATIF
LEMBAGA : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR)
UNIT KERJA : FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MOH. EDDY D SOEPARNO
2. Jabatan : ANGGOTA DPR RI
3. NHK : 539383

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 90.043.300.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 489 m2/342 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 19.560.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 553 m2/250 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 22.120.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 784 m2/315 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 31.360.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 1022 m2/386 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 8.176.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/117 m2 di KAB / KOTA CIREBON, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
6. Tanah Seluas 1605 m2 di KAB / KOTA CIREBON, HASIL SENDIRI Rp. 321.000.000
7. Tanah Seluas 1660 m2 di KAB / KOTA CIREBON, HASIL SENDIRI Rp. 332.000.000
8. Tanah Seluas 772 m2 di KAB / KOTA KUNINGAN, HASIL SENDIRI Rp. 231.600.000
9. Tanah Seluas 162 m2 di KAB / KOTA KUNINGAN, HASIL SENDIRI Rp. 48.600.000
10. Tanah Seluas 1350 m2 di KAB / KOTA KUNINGAN, HASIL SENDIRI Rp. 405.000.000
11. Tanah Seluas 1917 m2 di KAB / KOTA KUNINGAN, HASIL SENDIRI Rp. 575.100.000
12. Tanah Seluas 2040 m2 di KAB / KOTA CIREBON, HASIL SENDIRI



Rp. 408.000.000

13. Tanah Seluas 2130 m2 di KAB / KOTA CIREBON, HASIL SENDIRI

Rp. 426.000.000

14. Tanah Seluas 1810 m2 di KAB / KOTA CIREBON, HASIL SENDIRI

Rp. 362.000.000

15. Tanah Seluas 2050 m2 di KAB / KOTA CIREBON, HASIL SENDIRI

Rp. 410.000.000

16. Tanah Seluas 1600 m2 di KAB / KOTA CIREBON, HASIL SENDIRI

Rp. 320.000.000

17. Tanah Seluas 1860 m2 di KAB / KOTA CIREBON, HASIL SENDIRI

Rp. 372.000.000

18. Tanah Seluas 1660 m2 di KAB / KOTA CIREBON, HASIL SENDIRI

Rp. 332.000.000

19. Tanah Seluas 1620 m2 di KAB / KOTA CIREBON, HASIL SENDIRI

Rp. 324.000.000

20. Tanah Seluas 2070 m2 di KAB / KOTA CIREBON, HASIL SENDIRI

Rp. 414.000.000

21. Tanah Seluas 1845 m2 di KAB / KOTA CIREBON, HASIL SENDIRI

Rp. 369.000.000

22. Tanah Seluas 1660 m2 di KAB / KOTA CIREBON, HASIL SENDIRI

Rp. 332.000.000

23. Tanah Seluas 1490 m2 di KAB / KOTA CIREBON, HASIL SENDIRI

Rp. 298.000.000

24. Tanah Seluas 1640 m2 di KAB / KOTA CIREBON, HASIL SENDIRI

Rp. 328.000.000

25. Tanah Seluas 2610 m2 di KAB / KOTA CIREBON, HASIL SENDIRI

Rp. 522.000.000

26. Tanah Seluas 2010 m2 di KAB / KOTA CIREBON, HASIL SENDIRI

Rp. 402.000.000

27. Tanah Seluas 2470 m2 di KAB / KOTA CIREBON, HASIL SENDIRI

Rp. 494.000.000

28. Tanah Seluas 2005 m2 di KAB / KOTA CIREBON, HASIL SENDIRI

Rp. 401.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp.

3.350.000.000

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNNER Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.

450.000.000

2. MOBIL, TOYOTA ALPHARD Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.



800.000.000

3. MOBIL, MERCEDES BENZ S400 Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.

2.100.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 6.500.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. 28.622.304.168

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 6.351.481.334

F. HARTA LAINNYA

Rp. 114.445.000.000

Sub Total

Rp. 249.312.085.502

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 249.312.085.502

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.